



EVALUASI SAKIP (SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) TAHUN 2021

DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB

Mataram, 6 September 2021

CASCADING/POHON KINERJA

VISI:

“Membangun NTB Yang Gemilang”



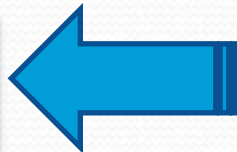
MISI 5:

NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI
Melalui penanggulangan kemiskinan ,
mengurangi kesenjangan dan
pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu
pada pertanian, pariwisata dan
industrialisasi



TUJUAN RPJMD:

“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
yang berkualitas”



INDIKATOR RPJMD:

Tingkat kemiskinan



SASARAN 1:

“Menurunnya pengangguran terbuka”



INDIKATOR :

tingkat pengangguran terbuka



INDIKATOR RENSTRA:

Persentase Pertumbuhan KUKM

SASARAN 1 :

“Meningkatnya
Koperasi yang Modern
dan Berdaya Saing”



INDIKATOR 1:

Jumlah Koperasi
Modern



INDIKATOR 2:

Prosentase
Pertumbuhan
KSP/USP yang
menerapkan Pola
Syariah

SASARAN 2:

“Meningkatnya
Kapasitas pelaku
usaha kecil dan
menengah”



INDIKATOR 1:

Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah

PROGRAM/KEGIATAN DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR RENSTRA
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Mendukung Sasaran 1, Indikator 1 dan 2
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
III	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Mendukung Sasaran 1, Indikator 1 dan 2
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR RENSTRA
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Mendukung Sasaran 1, Indikator 1 dan 2
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Mendukung Sasaran 2, Indikator 1
1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Mendukung Sasaran 2, Indikator 1
1	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
VII	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Mendukung Sasaran 1, Indikator 1 dan 2
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Mendukung Sasaran 2, Indikator 1
1	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD 2019-2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Koperasi yang Modern dan Berdaya Saing	1. Pertumbuhan Koperasi Modern	15	15	15	45
		2. Persentase Penumbuhan KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah	12,66	18,89	25,31	56,96

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD 2019-2023			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	
2.	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Kecil dan Menengah	3. Jumlah Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah	5	5	5	15

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	RP (000)	Target Kinerja	RP (000)	Target Kinerja	RP (000)	Target Kinerja	RP (000)	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah										
		Pengolahan Data Retribusi Daerah										
		Penetapan Wajib Retribusi Daerah										
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah										
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
		Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya SDM Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	75	10	100	15	125			
		Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
		Peningkatan Pelayanan BLUD										
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Koperasi yang memiliki izin Usaha Simpan Pinjam	10	850	10	1,08	10	1,21			
		dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP-PS lintas Kab/Kota yang difasilitasi	10	450	10	540	10	550			
		wilayah keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Jumlah KSP/USP-PS yang difasilitasi penerbitan izin usaha dan pembinaan usaha	10	450	10	540	10	550			
		Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah	Jumlah KSP/USP yang dibina dan dikembangkan	1	400	1	540	1	660			
		Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang,	Jumlah KSP/USP yang difasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Lintas Kab/Kota	2	200	2	300	2	400			
		Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi										
		Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah										
		Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
		dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi										
		Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit Sistem Perizinan Koperasi Berbasis Elektronik	1	200	1	240	1	260			

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2021		2022		2023		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	RP (000)	Target Kinerja	RP (000)	Target Kinerja	RP (000)	Target Kinerja	RP (000)	
		Program Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas terhadap Koperasi Aktif	22,42	1.900	22,42	2.250	22,42	2.500			
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha dan jaringan	50	1.900	50	2.250	50	2.500			
		Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang dibina pengembangan kelembagaan/	50	1.500	50	1.800	50	2.000			
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses	Fasilitasi kemitraan koperasi dan jaringan usaha dengan pihak	10	400	10	450	10	500			
	Jumlah Usaha Kecil menjadi Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	UKM yang Tangguh dan Mandiri	30	4.000	40	4.800	50	5.500			
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan	UKM yang difasilitasi peningkatan Kapasitas Usaha	30	4.000	40	4.800	50	5.500			
		Menumbuhkan/UMKM untuk Menjadi	Jumlah UKM yang difasilitasi peningkatan akses permodalan	375	4.000	375	4.800	375	5.500			
		Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan										
		Program Pengembangan UMKM	UKM yang Tangguh dan Mandiri	5,42	1.429	6,03	1.782	6,63	2.153			
		Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan S	Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas UKM	30	200	40	285	50	366			
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah yang difasilitasi peningkatan akses pemasaran dan	500	1.229	500	1.497	500	1.787			
			Jumlah Sumber Daya UKM dan Wirausaha yang terdidik, terlatih dalam pengelolaan usahanya									
				5,42	1.429	6,03	1.782	6,63	2.153			

MATRIK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023	Perangkat Daerah								
							I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.11		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			52.157.002.085				7.804.393.500		723.670.222		722.212.680		64.829.487				3.073.692.587					6.996.443.454			
2.11.1		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			52.157.002.085				7.804.393.500		723.670.222		722.212.680		64.829.487				3.073.692.587					6.996.443.454			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	7.960.360.740	115,38	1.003.307.224,00	100	464.788.152	17,48	256.085.156	19,27	282.224.690	1,14	16.709.487	29,16	427.186.716	67,05	982.206.111	67,05	67,05	17,48	2.008.913.375	17,48	25,74		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur (%)	100	2.870.285.763	130,45	375.821.253,00	100	343.239.600	16,71	57.359.539	32,18	110.445.000	0,22	750.000	22,72	77.967.618	71,82	246.522.154	102,60	71,82	16,71	622.343.407	16,71	21,68		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	83.119.568	58,11	8.000.000,00	148	9.205.600	19,55	1.800.000	47,01	4.327.500		49.24	4.533.100	49,24	10.660.600	102,59	115,81	107,35	18.660.600	107,35	22,45			
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai IKJIP OPD (%)	95	1.716.678.806	20,00	301.163.400,00	95	297.689.648	21,69	64.567.000	31,89	94.850.000		52.68	156.811.500	106,23	316.228.500	111,82	106,23	126,23	617.391.900	132,87	35,96			
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (%)	100	145.529.446	100,00	14.762.500,00	100	27.191.000		6.000.000		5.875.000		1,00	4.368.000	1,00	16.243.000	100,00	59,74	101,00	31.005.500	101,00	21,31			
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase Legalitas Usaha (%)	60	87.351.417	30,20	151.486.700,00	16,67	501.980.000						59,76	299.970.000	59,76	299.970.000	358,47	59,76	89,96	451.456.700	148,93	51,81			
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM (%)	100	28.457.725.103	14,92	581.655.950,00	17,69	3.578.035.000	8,42	301.428.528	4,93	176.363.390	1,32	47.370.000	5,94	212.682.204	20,62	737.844.122	116,59	20,62	35,54	1.319.500.072	35,54	4,64		
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil ke menengah (%)	0,33	2.017.525.329	1,67	163.484.000,00	1,67	366.085.000						1,67	305.600.000	1,67	305.600.000	100,00	83,48	0,00	469.084.000		23,25			
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	81,33	8.034.432.912	59,61	1291.000.000,00	65,14	216.179.500	3,00	36.430.000	3,96	48.127.100		6,07	73.861.000	13,03	158.418.100	20,00	13,03	72,64	1.458.087.900	89,31	18,15			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			119,90	66,39			72,24	24,94			
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	SEDANG			SEDANG	SANGAT RENDAH			

LANGKAH/UPAYA YANG DILAKSANAKAN DALAM PERBAIKAN PENERAPAN SAKIP

(Tindak lanjut evaluasi tahun sebelumnya)

1. Menindaklanjuti hasil Evaluasi atas implematasi SAKIP tahun 2020 pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB telah menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap tata kelola dan implementasi pelayan publik yang cepat, tepat dan akuntabel seperti dalam pemberian informasi tentang Program/Kegiatan dan pengukuran Kinerja melalui Teknologi Informasi berupa WEBSITE Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat : www.diskop.ntbprov.go.id dan Media Sosial (FB, Instagram, YouTube, WatsApp, Twitter) dan melalui penerbitan SOP (Standar Operasional Prosedur) layanan informasi publik.

2. Dalam rangka Pencapaian target kinerja terhadap pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB penerapan sistem mekanisme reward (penghargaan, apresiasi, peningkatan kesejahteraan) dan punishment berupa (pemberian sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat) yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PROGRES PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN

No	URAIAN SEBELUM	TINDAK LANJUT (SESUDAH)
1	Mempebaiki indikator Kinerja eselon III ,esselon IV dan staf yang tidak bersifat Outcame, tidak terukur, bersifat Output dan tidak menggambarkan Kinerja sesuai dengan levelnya	Sudah dilakukan Perbaikan terhadap Indikator Kinerja eselon III, eselon IV dan staf yang bersifat Outcame, terukur, bersifat Output dan menggambarkan Kinerja sesuai Levelnya
2	Memperbaiki keselarasan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dilakukan penyelarasan IKU dengan Indikator pada dokumen Renstra
3	Hasil pengukuran capain kinerja eselon III, eselon IV,dan staf	Reward dan Punishment berdasarkan peraturan yang berlaku
4	Mendokumentasi setiap Progam yang dilaksanakan	Dokumentasi melalui publikasi Teknologi Informasi pada www.diskop.ntbprov.go.id
5	Meningkatkan Evaluasi Program untuk menilai keberhasilan Program, Perbaikan Perencanaan Kinerja dan Meningkatkan Kinerja Organisasi	Meminta pendampingan/assessment dari BPKP, Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi dan melakukan Rapat berkala secara periodik dengan unsur pimpinan dan staf

PROGRESS PENYEDERHANAAN BIROKRASI

1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Ukm Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi tugas dan Fungsi serta tata kerja dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Pembinaan Koperasi
 - Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi
 - Seksi Pengembangan usaha Koperasi
 - Seksi Penilaian Akuntabilitas Koperasi

- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - Seksi Pemasaran dan Jaringan UKM
 - Seksi Pengembangan UKM
 - Seksi Standarisasi dan Legalitas UKM
- e. Bidang Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam
 - Seksi Kelembagaan dan Perijinan Koperasi SP/Usaha
 - Seksi Permodalan Koperasi SP/USP Koperasi
 - Seksi Pembinaan Koperasi dan Usaha SP Syariah
- f. Bidang Pengawasan Koperasi
 - Seksi Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi
 - Seksi Pemeriksaan Usaha
 - Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi
- g. Kelompok Jafung (Jabatan Fungsional)
- h. Kepala UPTD Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Peningkatan Kapasitas SDM
 - Seksi Fasilitas Pengembangan KUKM

DAMPAK AKIBAT PANDEMI TERHADAP CAPAIAN KINERJA

1. Kasus pandemi Covid-19 telah mempengaruhi seluruh sendi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan kejadian ini, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB merubah paradigma strategi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan yang selama ini bersifat Off line menjadi On line untuk mensosialisasikan dan melaksanakan Program/Kegiatan melalui Webinar, Zoom, daring dan pemanfaatan Teknologi Informasi lainnya.
2. Program/Kegiatan yang telah disusun mengalami perubahan disebabkan karena adanya Refocussing anggaran yang dilakukan berkali-kali sehingga rencana capaian kinerja yang telah disusun tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Hal ini berdampak pada Capaian Kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.



TERIMA KASIH